

ekonomi Indonesia. Ada yang menganjurkan agar ditingkatkan kerja sama ekonomi dengan dunia internasional, khususnya dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Hal ini perlu dilaksanakan guna menyelaraskan perkembangan ekonomi dunia dengan perkembangan ekonomi negara-negara ASEAN yang penuh dengan persaingan.¹

Globalisasi dewasa ini telah melahirkan berbagai kejadian atau hal baru dalam perkembangan ekonomi dunia diantaranya yaitu terjadinya era pasar bebas internasional, interdependensi sistem baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi, lahirnya berbagai macam lembaga ekonomi internasional, pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional, maju pesatnya pelaku ekonomi *trans nasional cooperation* dan lain-lain. Hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh hukum yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang berkepentingan, begitupula dengan politik dan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, akan dibahas tentang bagaimana peran politik dalam pembangunan ekonomi di Indonesia?, dengan menggunakan metode dan pendekatan deskriptif

analitis serta memberikan kasus, sehingga penggambaran tentang bagaimana peran politik dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dideskripsikan dengan baik.

A. Pembangunan Ekonomi Nasional

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan dari yang kurang baik menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya tersebut harus berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis. Karena masing-masing negara memiliki usia kadaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.²

Bagi bangsa Indonesia secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kahidupan bangsa,

¹ Pak Nandang, saat perkuliahan di auditorium uii, Kamis, 10-12-2015

² Liat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Bab I

Indonesia sejak tahun 2005 menggunakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, diantaranya adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), rencana kerja pemerintah.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional (selanjutnya disebut RPJPN) terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Rancangan tersebut sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2015 (yang selanjutnya disebut RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.

Rencana pembangunan jangka menengah nasional (selanjutnya disebut RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN tahun 2005-2009, RPJMN Nasional II Tahun 2010-

2014, RPJMN Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024. Rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Melihat dari arah kebijakan ekonomi indonesia, seharusnya pemerintah dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik sesuai dengan cita luhur bangsa, apabila membuat undang-undang terlebih dulu melakukan penelitian atau riset secara mendalam supaya substansi dari undang-undang tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat, sehingga masyarakat sejahtera, mendengar keluhan yang ada terutama yang ditemukan dalam praktik, ada baiknya mendengar dari pada *User*, diketahui secara jelas politik hukum yang hendak diakomodasi dan dihindari sedapat mungkin aspek politisi agar amandemen undang-undang berlaku secara operasional.

Dalam menjalankan roda perekonomian tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, potensi yang dimiliki, serta tujuan bernegara

Jawa. Perputaran ekonomi di Jawa mencapai 57,63 persen dan di Sumatera mencapai 23,77 persen. Wilayah yang lain menerima sisanya. Bahkan di Bali dan Nusa Tenggara, pertumbuhan ekonomi berada dalam tren menurun sejak 3 tahun terakhir. Dari 2,73 persen di tahun 2010 dua daerah itu turun menjadi 2,65 persen di tahun 2011 dan di tahun 2012 turun lagi menjadi 2,51 persen.⁸

Faktor lain yang sangat dominan adalah negara telah menganggarkan dana daerah untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi, namun seringkali anggaran dana yang digelontorkan ke daerah-daerah banyak yang bocor atau dikorupsi. Kondisi ini tidak terlepas dari buruknya birokrasi negara saat ini. Hal inilah yang menyebabkan dana transfer daerah menjadi tidak efisien sehingga peningkatan dana tidak diikuti dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat daerah. Padahal belanja pegawai di seluruh provinsi hingga tingkat kabupaten dan kota mempunyai porsi 42,3 persen dari APBNP 2012. Inilah yang mengakibatkan peran desentralisasi tidak memberikan efek yang cukup besar terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah dan keadilan ekonomi daerah melalui terciptanya pemerataan. Disparitas pembangunan antar wilayah dan antar desa kota seharusnya tidak terjadi jika desentralisasi fiskal berjalan dengan baik. Sebab nilai transfer daerah sangat besar dan itu bisa menjadi momentum yang baik untuk menggerakkan perekonomian daerah.⁹

Saat ini pemerintah pusat memberikan dana ke desa-desa sebesar 1 (satu) miliar sampai 1,2 (satu miliar dua ratus juta rupiah) keseluruh Indonesia. Apabila dana tersebut berjalan dengan baik, kemungkinan besar desa seluruh Indonesia mengalami kemajuan dan kemakmuran yang pesat, namun apabila dana tersebut banyak yang bocor artinya masih banyak yang dikorupsi sehingga dana tersebut tidak dapat diserap oleh desa, maka kemanfaatan dan kesejahteraan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemakmuran tidak lagi terwujud.

Disamping itu tingkat pendidikan dan kesehatan, perhatian perlu diberikan pada pembangunan moral, akhlak, dan budi pekerti yang tinggi, serta memiliki karakter yang kuat sebagaimana yang

⁸ *Ibid*, hlm. 113.

⁹ Aunur Rofiq, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kebijakan dan Tantangan Masa Depan*, Republika Penerbit, Jakarta, 2014, hlm. 113.

teknologi tidak memiliki sepenuhnya oleh para tenaga kerja lokal?, bagaimana kita yakin bahwa kita mandiri pada saat kita tidak memiliki posisi tawar di dalam pusaran lalu lintas barang, jasa dan uang di pasar internasional?.¹¹

Pertanyaan tersebut sangat sulit dijawab, karena untuk saat ini hal tersebut memang terjadi di negara kita, masih banyak kekurangan dan hambatan yang harus dijadikan pekerjaan rumah, baik oleh pemerintahan secara umum dan masyarakat. Untuk saat ini pemerintah seakan-akan hanya mengambil keuntungan pribadi atau golongan yang hanya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang terbatas, tetapi untuk jangka waktu yang panjang rakyat harus menanggung kerugian dari dampak yang dilakukan oleh pemerintahan.

Menarik jika kita baca dalam kompas edisi minggu, 13 Desember 2015, publik bicara ekonomi kapitalis dan ekonomi kerakyatan, Indonesia menganut dan mengimplementasikan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi kerakyatan. Namun dalam kenyataannya, Indonesia lebih mengimplementasikan sistem kapitalis.

Kapitali lebih mengedepankan investasi besar-besaran dan berupaya memengaruhi pemerintah agar memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi perkembangan bisnisnya. Dengan berbagai fasilitas dan kemudahan dari pemerintah, perusahaan mendapatkan kepentingan besar dalam waktu singkat sehingga dapat mengembangkan perusahaan melalui investasi lainnya. Ekonomi kapitalis berkembang pesat lantaran perbankan sangat berminat memberikan dana kepada para pengusaha.¹²

Konglomerat yang tumbuh dan berkembang menjadi indikator berkenbangnya sistem ekonomi kapitalis dalam sebuah negara. Indikator lainnya antara lain makin banyaknya unjuk rasa buruh yang memperjuangkan hak-haknya belum terpenuhi terkait peningkatan kesejahteraan. Dengan orientasi keuntungan berlipat, sistem ekonomi kapitalis akan mengikis nilai kebersamaan dan gotongroyong dalam masyarakat Indonesia. Kesejahteraan buruh dikalahkan naluri untuk menguasai dan memeralat buruh yang

¹¹ Tim Ahli Seknas Jokowi, *Ibid*, hlm. 645.

¹² Kompas, Minggu, 13 Desember, 2015, hlm. 12

dipandang sebagai alat produksi semata.¹³

Pemerintah selama ini tidak melakukan sesuatu yang berarti agar komoditi-komoditi utama dapat diproduksi di Indonesia. Pemerintah malah berlaku ramah terhadap produk impor. Itu berarti sama halnya membiarkan terus terjadinya ketidakadilan. Harga komoditi di negara maju bisa lebih murah karena petani diberi subsidi pertanian dan ekspor yang besar.¹⁴ Impor pangan yang besar harus disadari berdampak langsung, yaitu terkurasnya devisa negara. Dampak tidak langsung hilangnya peluang untuk menyerap tenaga kerja yang lebih besar di sektor pertanian/peternakan. Ketergantungan terhadap impor menempatkan Indonesia pada kondisi rawan dan dilematis.

Pemerintah masih mengambil kebijakan impor garam, padahal sumberdaya alam Indonesia dua pertiga wilayah Indonesia merupakan lautan, dan Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang diseluruh dunia. Kenapa Indonesia tidak

dapat mengelola garam lokal, seandainya kurang dalam kualitas kenapa tidak ditingkatkan saja kualitasnya tanpa mengimpor. Pemerintah harus mengimpor garam sebanyak 1,58 juta ton pertahun senilai Rp.900 miliar.¹⁵

Daging sapi sampai saat ini Indonesia belum pernah mampu berswasembada. Dari kebutuhan sekitar daging sapi nasional sekitar 400.000 (empat ratus ribu) ton (1,8 juta ekor sapi) setahun, yang dapat dipenuhi di dalam negeri baru 65 (enam puluh enam) persen, sisanya 35 (tiga puluh lima) persen diimpor dari Australia, Amerika Serikat dan Selandia Baru senilai Rp. 4,8 triliun.¹⁶ Padahal membiarkan impor daging sapi akan menimbulkan berbagai dampak, yaitu menghambat peningkatan pendapatan peternak dalam negeri, menghilangkan kesempatan kerja baru, menghambat pengentasan kemiskinan dan hilangnya peluang ekspor ternak.

B. Peranan Politik Dalam Pembangunan Ekonomi

Demokrasi memiliki arti positif yang mengandung makna baik. Seorang pemimpin atau suatu pemerintah yang

¹³ *Ibid*

¹⁴ Hatta Taliwang, Salamuddin Daeng dkk, *Indonesiaku Tergadai*, Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, Jakarta, 2011, hlm. 66.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 67.

¹⁶ *Ibid*

tidak menghormati demokrasi otomatis menampilkan konotasi negatif atau kurang baik. Perkataan demokrasi memang mempunyai banyak arti, namun satu pengertian yang pasti dapat kita setuju adalah bahwa demokrasi dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa kekuasaan yang sebenar-benarnya berada di tangan rakyat. Demokrasi politik menolak sistem konsentrasi kekuasaan pada satu kelompok. Apalagi satu tangan atau sistem otoriter. Negara Indonesia sudah memiliki sistem pemerintahan yang baik dalam trias politika dimana di dalamnya terkandung nilai *check and balances*. Demokrasi politik menghendaki pemerataan kekuasaan politik, yakni kekuasaan harus berada di tangan rakyat.

Memaknai pancasila sebagai sebagai ideologi ekonomi indonesia harus disandingkan dengan prinsip-prinsip lain dari ajaran Bung Karno, yaitu egalitarianisme, anti kapitalisme dan imperialisme, serta akses seluas-luasnya bagi rakyat dalam aktivitas ekonomi. Dari ketiga prinsip tersebut maka ciri dari sistem ekonomi pancasila dapat didefinisikan seperti yang dirumuskan oleh Prof. Mubyarto sebagai berikut: (1) roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral,

(2) masyarakat berkehendak kuat untuk mewujudkan pemerataan sosial, (3) nasionalisme ekonomi, (4) demokrasi ekonomi, dan (5) keseimbangan antara perencanaan nasional dan otonomi daerah. Kesemuanya menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima ciri sistem Ekonomi Pancasila, bangsa dan negara Indonesia dapat berdiri kokoh dan berdaulat penuh atas kehidupan ekonominya.¹⁷

Peranan pemerintah dalam sistem perekonomian, pemerintah adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan atas mereka yang hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan pelayanan dan pendanaan. Untuk maksud itu pemerintah menarik pajak, pemungutan lain. Pelayanan pemerintah berupa penyediaan barang dan jasa, misalnya pertahanan dan keamanan, peradilan dan pendidikan. Semula terbatas pada hal-hal itu saja, namun dengan bergulirnya waktu pemerintah memandang perlu untuk melaksanakan program-program demi kesejahteraan masyarakat, misalnya asuransi (hari tua dan pengangguran), penanggulangan

¹⁷ Tim Ahli Seknas Jokowi, Ibid, hlm. 648.

memanfaatkan negara-negara berkembang, sehingga negara yang berkembang sulit untuk maju. Negara-negara berkembang seakan-akan terkena ciuman yang mematikan dari negara-negara yang maju.²²

Dari situ seharusnya pemerintah harus lebih jeli lagi dalam menjalin hubungan kerja sama dengan negara asing, terutama terhadap negara-negara yang *super power* sehingga negara tidak lagi dirugikan oleh kerja sama akibat kontrak yang telah dibuat. Keputusan yang dibuat pemerintah harus menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.²³ Kontrak yang dibuat oleh pemerintah seharusnya mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945 sehingga kemanfaatannya benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat secara luas.

Dewasa ini masih sangat banyak peraturan perundang-undangan di sektor ekonomi, politik, sosial, dan kesejahteraan rakyat, terutama setelah tahun 1998, hanya saja banyak peraturan

perundang-undangan tersebut dianggap mati karena tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penyebabnya adalah pembuatan peraturan perundang-undangan dilakukan terburu-buru, tidak dilakukan riset mendalam dengan naskah akademik yang baik (lebih mementingkan adanya peraturan perundang-undangan daripada esensi yang diatur). Penyebab yang lain adalah budaya hukum masyarakat Indonesia yang belum sesuai dengan nilai-nilai yang diatur dalam berbagai undang-undang yang telah dibuat.²⁴

Seharusnya Undang-undang yang tidak sesuai dengan perekonomian dan kebutuhan masyarakat segera diamandemen, amandemen terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibagi menjadi lima kategori, *Pertama*, untuk memperjelas ketentuan yang mengundang multi-interpretation. *Kedua*, amandemen dilakukan untuk lebih menyesuaikan antara nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan termasuk kesiapan infrastruktur pendukung peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, untuk memperbaiki substansi, termasuk prinsip yang diatur. Misalnya pengaturan tentang pengadilan

²² Pak Nandang, Power Point Sekaligus Keterangan Waktu Kuliah, Kamis, 10 Desember 2015.

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 19.

²⁴ Pak Nandang, *Ibid*

pembangunan politik sudah pasti akan mengganggu pembangunan nasional secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan politik merupakan persyaratan bagi keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan politik tersebut membentuk berbagai wahana yang mutlak diperlukan untuk menggerakkan roda pembangunan nasional.

Masalah utama dalam pembangunan politik negara-negara yang sedang berkembang adalah pencarian format demokrasi yang cocok dengan nilai-nilai budaya masyarakatnya sendiri. Format demokrasi tersebut harus dicari dan diciptakan sendiri karena demokrasi liberal seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya. Indonesia adalah salah satu contoh dalam kasus ini. Dengan demikian, masalah utama yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah penentuan format demokrasi yang akan digunakan (yakni yang disebut dengan demokrasi pancasila).²⁹ Bagian yang paling penting dari penentuan format tersebut adalah pengidentifikasian demokrasi pancasila sehingga struktur dan mekanisme kerjanya jelas, pasti dan praktis, disamping mengandung keunggulan-

keunggulan yang benar-benar nyata dibandingkan dengan jenis-jenis demokrasi lainnya.

D. Penutup

Dari penjelasan di atas dapat ditarik garis merah, bahwasannya dalam perkembangan ekonomi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, diantaranya adalah faktor politik, globalisasi atau pasar bebas, sistem ekonomi kapitalis dan lain-lain. Perkembangan ekonomi juga terdapat tantangan yang harus segera diselesaikan seperti halnya politik yang harus pro rakyat bukan sebaliknya malah pro terhadap pelaku modal asing yang tidak memperdulikan nasib rakyat, tetapi hanya mengambil keuntungan saja.

Indonesia belum mandiri dalam hal memenuhi kebutuhan rakyatnya, terbukti dengan banyaknya barang-barang yang masih impor, bahkan dalam hal pangan Indonesia masih impor, padahal jika pemerintah serius ingin mensejahterakan masyarakatnya, pemerintah dapat mendayagunakan kemampuan masyarakat. Menswasembadakan hal-hal yang dianggap mampu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakatnya. Sehingga negara tidak selalu bergantung pada negara lain.

²⁹ *Ibid*, hlm. 228.

dalam lapangan. Pemerintah dapat menerima masukan dari rakyat dalam hal memasukkan atau menentukan isi/substansi dalam pembuatan Undang-undang.

Hubungan politik dan ekonomi harus harmoni saling bergantung atau berhubungan satu sama lain, supaya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri, dikhawatirkan pelaku ekonomi semenah-menah dalam menjalankan perekonomiannya, begitu pula dengan politik tidak dapat berdiri sendiri, karena politik sebagai pembuat kebijakan atau keputusan harus menjamin perekonomian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan konstitusi Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945.

Daftar Pustaka

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2015

Rofiq, Aunur, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kebijakan dan Tantangan Masa Depan, Republika Penerbit, Jakarta, 2014.

Reksohadiprodjo, Sukanto, Ekonomika Publik (Edisi Pertama), BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

Jokowi, Tim Ahli Seknas, Jalan Kemandirian Bangsa, Gramedia, Jakarta, 2014.

Salamuddin, Hatta Taliwang, Daeng dkk, Indonesiaku Tergadai, Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, Jakarta, 2011.

Pak Nandang, Power Point Sekaligus Keterangan Waktu Kuliah.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 2010.

Munandar, Haris, Pembangunan Politik Situasi Global, dan Hak Asasi Di Indonesia (Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Kompas, Minggu, 13 Desember, 2015.